



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SRIWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERWIN
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 70834

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.137.888.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 592 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 137.888.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 326.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU AYL A Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
5. MOTOR, YAMAHA 1KP A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 270.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.744.888.000**III. HUTANG** Rp. 24.568.800**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.720.319.200



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.